

## BAB II

### DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

#### A. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

Hubungan antara pers dan kepentingan politik di Indonesia telah berlangsung sejak zaman Belanda mulai menjajah negeri ini. Upaya rakyat Indonesia untuk ikut menerbitkan surat kabar waktu itu selalu mendapat halangan dari pemerintah Belanda, alasannya karena pihak VOC takut kalah saing sekaligus khawatir dengan isi pemberitaan nasional yang dianggap akan membahayakan pihak mereka.<sup>30</sup> Jangkauan kekuasaan politik terhadap kehidupan pers akhirnya selalu seperti itu dari masa ke masa, yaitu selalu berada di bawah sistem pengontrolan yang ketat. Tak jarang beberapa kasus pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah harus diproses di pengadilan.

Pada awal abad ke-20, pers di Indonesia mulai banyak muncul bersamaan dengan tumbuhnya sejumlah organisasi politik, yang pada akhirnya menggunakan pers sebagai wadah untuk menyuarakan gagasan-gagasan mereka. Pemberian nama sebagian besar surat kabar saat itu juga mencerminkan sikap perjuangan nasionalisme, seperti *Suara Kemerdekaan*, *Suara Berjuang*, *Benih Kemerdekaan*, dll. Hubungan pers dan politik kemudian menjadi semakin dinamis setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Dalam rentang antara tahun 1945-1966, dinamika pers berubah-ubah

mengikuti perkembangan politik nasional saat itu, dari politik transisional, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin yang menjadikan pers sebagai alat politik pemerintahan yang otoriter.

Pengaruh kekuatan politik masih terus membayangi pers Indonesia hingga di masa Orde Baru. Dalam praktiknya, pers dianggap sering menimbulkan kontroversi akibat terlalu besarnya pertimbangan politik ketimbang penegakan perundangan itu sendiri. Misalnya tentang ditetapkannya peraturan wajib mengenai Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak kepada setiap media, yang proses pengeluarannya diurus bukan oleh Menteri Penerangan namun oleh Laksus Kopkamtib, yang notabene adalah instrumen kekuasaan buatan Orde Baru. Ketetapan ini diyakini insan pers agar pemerintah mudah melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap isi pemberitaan.

Pers lalu mulai bersinggungan dengan dunia bisnis ketika Menteri Penerangan mengeluarkan peraturan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang memungkinkan para pengusaha untuk menjadikan pers sebagai sebuah usaha profit. Di saat yang sama, banyak pihak menyatakan bahwa hal tersebut akan mengaburkan idealisme yang selama ini menjadi ciri pers Indonesia. Baru di era reformasi, cengkaman kekuasaan pemerintah yang otoriter sudah sangat jauh berkurang terhadap insan pers. Pada masa ini pula, pers sepenuhnya bergulat di dalam mekanisme pasar yang memungkinkan

membuka untuk mencari keuntungan sebanyak banyaknya tanpa ada tekanan

Walaupun begitu, ada juga dampak lain yang dibawa oleh era reformasi, misalnya menguatnya kecenderungan media dalam beberapa hal, seperti: 1) Memberi basis yang kuat bagi lahirnya pers industri dengan menggeser gejala pers idealis; 2) Mengundang para pemodal untuk masuk ke dunia pers yang belum tentu menjadi bisnis utama mereka; dan 3) Memunculkan kelompok-kelompok usaha penerbitan pers.<sup>31</sup> Kecenderungan ini rupanya membawa dampak lain bagi masyarakat. Bila dulu pers dibatasi isi dan penyebarannya, sekarang malah dirancang sedemikian rupa oleh kepentingan tokoh-tokoh tertentu untuk memenuhi kebutuhan politik mereka.

Bagi Dedy N Hidayat, media massa milik pers saat ini telah menjelma sebagai *driven politics*, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai penghubung antara partai politik dengan warga.<sup>32</sup> Lebih jauh, media juga diyakini berperan dalam menghimpun dan mempertahankan dukungan masyarakat dalam pemilu; memobilisasi dukungan publik terhadap suatu kebijakan; merekayasa citra kinerja sang kandidat; dan sebagainya.

Kecenderungan hubungan media dan politik yang saling mempengaruhi ini menimbulkan pertanyaan tentang isi pemberitaan yang dinilai sudah menjauhi kebenaran. Bila hal ini benar adanya, maka media akan dianggap tidak lagi mampu menjalankan fungsinya terdahulu, yaitu sebagai 'anjing penjaga' yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada segelintir orang tertentu.

<sup>31</sup> Ibid, hal 66.

<sup>32</sup> *Membongkar Perselingkuhan Media Massa dan Partai Politik*, (akses 16 November 2013), tersedia di <http://www.kompas.com/berita/2011/09/16/membongkar-perselingkuhan-media-massa.html>

## B. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

### 1. Sejarah, Perkembangan, dan Dinamika

Gambar 2

Logo PKS



Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1632066/PKS.Jangan.Lagi.Ngaku.Partai.Islam>

PKS yang awalnya bernama Partai Keadilan ini secara resmi didirikan pada 20 Juli 1998. Cikal bakalnya bermula dari gerakan ke-Islaman yang diberi nama Jemaah Tarbiyah dan mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional maupun struktural. Gerakan dakwah ini kemudian merebak dan mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai

menonjol adalah persaudaraan (*ukhuwah*) yang dibangun di antara mereka. Hal tersebut dijadikan sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik.<sup>33</sup>

Dengan mengusung ruh keislaman lewat media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, jaringan gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental. Dari yang awalnya hanya berbasis kaum muda terdidik atau aktivis kampus, sekarang sudah meluas ke seluruh elemen masyarakat seperti serikat pekerja, paguyuban tukang becak, pemulung, dan anak jalanan. Selain gerakan dakwah, kejatuhan Orde Baru pada Mei 1998 juga menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi sejarah berdirinya PKS. Saat itu, para aktivis dakwah Islam mencetuskan perlu dikembangkannya sebuah iklim baru yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan cita-cita mereka yang sebelumnya diawasi ketat oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridhai Allah SWT.<sup>34</sup>

Suara para aktivis dakwah ini tercermin dalam sebuah survey yang diadakan untuk melihat respon mereka terhadap kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat itu. Hasil survey menunjukkan bahwa pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan, guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang.

---

<sup>33</sup> *Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia*, Jakarta, 2004, hal 301.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Partai Keadilan (PK) kemudian dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Meski tergolong baru, PK mampu membuktikan kemampuannya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan lewat keberhasilannya menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 peserta parpol Pemilu 1999, terkumpulnya 1,4 juta suara dengan jumlah 7 kursi di DPR, 21 kursi DPRD Tingkat I, dan sekitar 160 kursi di DPRD Tingkat II. Namun, hasil ini belum mencukupi ketentuan *electoral threshold* saat itu. Bila tetap ingin melanjutkan perjuangan di laga Pemilu 2004, PK diwajibkan mengganti nama dan lambang. Untuk menyikapi hal tersebut, PK berjuang bersama 41 partai lainnya demi merubah ketentuan yang dirasa tak adil tersebut. Namun di sisi lain, PK juga menyiapkan partai lain untuk mengantisipasi tetap diberlakukannya ketentuan itu.

Maka kemudian, pada 20 April 2002 didirikanlah sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah PK, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Proses pergantian kepemimpinan dan kepengurusan berjalan mulus di masing-masing internal partai. Hal ini bisa terjadi karena kedua partai mencoba menerapkan sistem demokrasi khususnya di tubuh internal sendiri. Salah satu sistem demokrasi yang terlihat adalah tentang adanya ketentuan bahwa pengurus maupun ketua tidak boleh mencalonkan diri atau ditunjuk, tetapi dipilih oleh semua pengurus dari pusat hingga ke tingkat yang paling kecil di daerah. Pengurus yang terpilih adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Ketua umum sekalipun, tidak diperbolehkan melakukan intervensi atas keputusan hasil pemilihan

PKS kemudian melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman dan HAM sebagai partai sementara pada 18 Maret 2003. Sejak saat itu, terdapat dua partai yang berjalan dan melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Setelah melewati berbagai tahapan lanjutan, seperti pengesahan sebagai partai politik yang berbadan hukum, perombakan serta pengukuhan pengurus, maka PKS baru dianggap sah bergabung dengan PK.

Pada masa kepresidenan Gus Dur (1999-2001), PKS berkoalisi dengan Poros Tengah dan berhasil menempatkan presiden pertamanya yaitu Nurmahmudi Ismail, sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun). Kekosongan posisi presiden kemudian diisi oleh Hidayat Nur Wahid. Namun, keikutsertaan PKS dalam pemerintahan koalisi poros tengah hanya berlangsung singkat. Ini dikarenakan telah terjadi 'politik aliran' yang disebabkan oleh tidak adanya kesamaan pemikiran dalam tataran implementasi.<sup>35</sup> Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai presiden, harus turun dari kursi kepresidenan akibat parpol-parpol Islam yang masih terkungkung pada aliran pemikirannya masing-masing.

Pada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PKS memutuskan tidak bergabung dengan koalisi pemerintah dan memilih menjadi oposisi parlemen. Berbagai kebijakan Presiden Megawati dikritik secara pedas dan tegas oleh PKS baik melalui forum DPR, media massa, maupun lewat cara demonstrasi. Walaupun demikian, perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 malah naik dan

---

<sup>35</sup> Chamzawi, *Masa Depan Indonesia Bila Parpol-Parpol Islam Memenangkan Pemilu 2004*, (akses 1 September 2013), tersedia dari URL: <http://chamzawi.wordpress.com/2008/07/26/masa-depan-indonesia-bila-parpol-parpol-islam-memenangkan-pemilu-2004/>

mencapai 8,3 juta suara dengan peningkatan jumlah 45 kursi di DPR. Peningkatan suara tersebut diperkirakan mencapai hingga 600 persen dari pemilu sebelumnya. Beberapa tokoh politik menilai, itulah masa emasnya PKS berjaya di Indonesia.<sup>36</sup> Kemudian pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpin SBY (2004-2009), PKS mendapatkan jatah tiga kursi kabinet. Jatah kursi itu kemudian bertambah satu lagi saat SBY memimpin kembali di KIB jilid II.

PKS sendiri dapat dibilang sebagai partai politik yang mampu mempertahankan eksistensinya dengan konsistensi perolehan suara dalam setiap pemilu.<sup>37</sup> Selain PKS, ada PPP, PAN, dan PKB yang seringkali diidentikkan sebagai partai Islam yang masih eksis hingga saat ini. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. PAN dan PKB sebenarnya berasas Pancasila, namun mempunyai basis massa yang kuat dari kalangan Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU. Pijakan karakter dan aliran pemikirannya pun berbeda-beda. PPP termasuk tradisional, PAN si modernis, PKB *post-tradisional*, sedangkan PKS pada awal kemunculannya digolongkan ke dalam *neo-revivalis*.<sup>38</sup>

Neo-Revivalis sendiri adalah sebuah pemikiran yang disadur dari gerakan di Mesir bernama Ikhwanul Muslimin, dan menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, serta warisan ulama salaf sebagai poros utama ajarannya. Artinya,

---

<sup>36</sup> Dil, *Ingin Kembali Berjaya di Jakarta, PKS Pertahankan Muka Lama*, (akses 15 Oktober 2013), tersedia dari URL: <http://www.jpnn.com/read/2013/04/08/166463/Ingin-Kembali-Berjaya-di-Jakarta,-PKS-Pertahankan-Muka-Lama->

<sup>37</sup> Suwardiman, *Seputar Pemilu 2009*, (akses 15 Oktober 2013), tersedia dari URL: <http://okepemilu09.blogspot.com/2009/07/partai-politik-parpol-baru-yang.html>

<sup>38</sup> ...



PKS benar-benar mengedepankan dirinya sebagai partai berbasis Islam yang mengutamakan gerakan dakwah. Ini tercermin dari adanya proses pengkaderan yang diberi nama *tarbiyah*. *Tarbiyah* sendiri merupakan jati diri dan salah satu keunggulan yang membedakan PKS dengan partai lainnya. *Tarbiyah* adalah proses inti dalam pembentukan ajaran dakwah yang dimulai sejak Jemaah *Tarbiyah* berkiprah sebagai gerakan keagamaan, hingga ketika akhirnya mereka bertransformasi sebagai PKS. Dalam prosesnya, *tarbiyah* tidak hanya dipandang sebagai proses pembinaan dan pengkaderan anggota, namun juga sebagai mekanisme pendewasaan yang terkait pada cita-cita bangsa dan umat Islam secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Perjalanan PKS sebagai partai Islam mulai mengalami perubahan iklim politik sejak keberhasilannya di Pemilu 2004. Banyaknya kader yang menduduki jabatan publik mulai membuat segelintir kader untuk ikut dalam perebutan kekuasaan yang lebih besar. Misalnya pada Juni 2010, yaitu ketika wacana PKS untuk menjadi Partai terbuka kembali menghangat setelah sebelumnya sempat terdengar pada tahun 2008. Publik mengendus wacana tersebut dari sebuah acara *talkshow* di televisi swasta yang menampilkan dua tokoh PKS sebagai narasumbernya.<sup>40</sup> Dalam acara yang berdurasi satu jam tersebut, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat antara masing-masing kader mengenai wacana tersebut. Kader pertama mengiyakan wacana PKS sebagai partai terbuka yang perubahannya dilakukan secara sadar oleh PKS.

---

<sup>39</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Jakarta, 2011, hal 174-175.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 308.

Namun, kader kedua membantah hal tersebut, menurutnya tak ada yang berubah di PKS saat ini.

Mencuatnya wacana ini menjadikan PKS mulai dinilai sebagai partai Nasionalis seperti partai-partai lain di Indonesia. Tidak sedikit partisipan yang menyayangkan sikap pragmatis PKS ini. Tujuan untuk menyasar segmen pemilih yang lebih luas, atau jelasnya pemilih di luar non-Islam, diyakini hanya sebagai keinginan segelintir kader PKS yang tidak bisa mewakili suara institusi. Perpecahan suara tentang wacana tersebut pun kemudian menjadi sorotan media massa yang merebak di masyarakat. Lebih jauh, PKS diisukan mempunyai masalah serius di tubuh internalnya. Isu konflik internal dan faksionalisasi (pengelompokan) terus memanas di periode waktu yang berbeda-beda. Secara umum, terdengar kabar bahwa internal PKS terbagi dalam dua kubu, yaitu faksi keadilan yang bersifat ideologis dan faksi kesejahteraan yang bersifat pragmatis.

Pengelompokan ini didasarkan pada persepsi, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing faksi. Faksi keadilan diidentikkan dengan kader-kader yang masih berpegang teguh pada ajaran dasar PKS sebagai Partai Dakwah yang mengajarkan hidup sederhana serta tidak berlebih-lebihan. Sedangkan faksi kesejahteraan terkesan menonjolkan gaya hidup yang cenderung mewah, padahal sebagian besar kader PKS yang termasuk dalam golongan *grassroot* banyak yang belum sejahtera secara finansial.

Sikap dari kalangan faksi kesejahteraan dinilai muncul karena adanya

kesejahteraan beranggapan bahwa PKS tidak akan mampu bertahan bila hanya mengedepankan kemampuan dalam bidang dakwah saja, namun juga harus melebarkan sayap di dunia bisnis. Oleh karena itu, faksi kesejahteraan menilai, kader yang berkontribusi adalah mereka-mereka yang dianggap 'mampu' mendatangkan uang dan kekuasaan di tubuh internal partai.<sup>41</sup> Ketidaktepahaman lain muncul dari sisi halal tidaknya sumber-sumber keuangan yang diakses PKS guna mendanai kegiatan. Perbedaan pendapat tersebut sempat memicu konflik internal yang sempat berpengaruh pada kelancaran roda organisasi sehari-hari di tingkat DPP. Walaupun begitu, isu faksionalisasi yang terus timbul tenggelam hingga saat ini, membuat bingung masyarakat umum atau bahkan anggota di tubuh PKS sendiri.

## **2. Profil Partai Keadilan Sejahtera**

### **a. Garis Besar Platform Kebijakan PKS**

PKS mengerucutkan masalah-masalah utama di Indonesia yang menjadi fokusnya dalam "**Sembilan K: Masalah Besar Bangsa**".<sup>42</sup> Isinya yaitu:

#### **1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan**

Korupsi diyakini oleh PKS telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat, semisal dari pelayanan publik yang rutin seperti mengurus surat keterangan atau perizinan, hingga pembuatan kebijakan dalam bentuk UU

<sup>41</sup> Ibid, hal 86.

<sup>42</sup> Ibid, hal 87.

atau Perda. Korupsi menunjukkan bahwa ada kelemahan yang besar dalam sistem pemerintahan saat ini, yang dampaknya tak hanya merugikan pemerintahan, tapi juga masyarakat.

## 2. Kemiskinan dan Pengangguran

Di poin ini, PKS menyimpulkan bahwa kemiskinan serta pengangguran merupakan indikator yang paling mudah diamati sebagai dampak krisis di Indonesia. Presentase kemiskinan terus melonjak tiap tahunnya, dan bahkan menyebar ke perkotaan akibat urbanisasi yang tak terkontrol. Hal ini menjadi semakin tak seimbang dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

## 3. Kebodohan

Rendahnya mutu pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber kebodohan. Di tingkat negara, pemerintah dianggap kurang mendukung sektor ini, mengingat masih dibatasinya anggaran, mahalnya biaya sekolah, serta skala prioritas pembangunan yang bisa dibilang tidak jelas.

## 4. Kriminalitas dan Kerawanan Sosial

Poin ini dianggap PKS sebagai konsekuensi logis atas kemiskinan dan kebodohan yang terjadi secara berlapis-lapis di tengah masyarakat. Hal ini makin diperburuk dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang masih sering menggunakan hukum sendiri (anarki), ketimbang hukum negara (polisi)

Lemahnya penegakan hukum dan sikap diskriminatif aparat juga mendukung peningkatan kriminalitas.

#### 5. Konflik dan Kekerasan

Poin ini membuktikan kerawanan sosial-politik yang menjelma dalam bentuk radikalisme komunal, premanisme, maupun terorisme canggih. Sumbernya seringkali berasal dari sistem politik yang rapuh serta mekanisme penyelesaian konflik yang lumpuh. Pelakunya bisa meluas, dari pertikaian masyarakat lokal, kekerasan antar pelajar, maupun premanisme dan terorisme.

#### 6. Keretakan Nasional dan Ancaman Disintegrasi

Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang belum menemukan titik seimbang di tengah derasnya tuntutan otonomi diyakini mendasari poin ini. Hubungan kekuatan sipil dan militer yang tidak setara juga terlihat masih memikirkan kepentingan masing-masing. Di sisi lain, PKS menyadari sulitnya mencari figur pemersatu untuk Indonesia yang sifatnya amat majemuk.

#### 7. Ketergantungan pada Dominasi Asing

PKS menggambarkan poin ini dengan pembengkakan hutang luar negeri setiap tahunnya, dimana sebagian besar (53%) adalah utang pihak swasta. Di lain pihak, hubungan Amerika Serikat, yang menjadi pendukung utama Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, bisa dibilang tidak sehat karena pengaruh yang terlalu dominan dalam sektor lainnya.

#### 8. Kelemahan Kepemimpinan

Poin ini terjadi di lokal maupun nasional. Lemahnya sikap para pemimpin di tataran nasional membuat banyak kebijakan strategis tak jalan, bahkan proses pengambilan keputusan berlangsung sepihak penuh intrik dan kegoncangan. Kepentingan pribadi atau kelompok juga telah mengemuka. Hal ini semakin memudahkan pengaruh Kepala Pemerintahan atau Presiden yang juga dianggap tidak bisa mengendalikan bawahannya secara efektif.

#### 9. Kerusakan Etika dan Budaya

Poin ini tercermin dari hubungan warga yang jauh dari etika kebangsaan, salah satunya sifat saling percaya antarsesama. Salah satu poin penting yang mendasari adalah berubahnya etika penyelenggara negara yang seharusnya menjadi pelayan publik, menjadi pemegang mandat. Selain itu, budaya luhur dan religius semakin tergantikan nilainya oleh pesona materialisme dan hedonisme.

Pemecahan masalah-masalah tersebut kemudian dirumuskan dalam **"Tujuh P: Agenda Bersama Penyelamatan Bangsa"**.<sup>43</sup> Ketujuh rangkaian solutif ini sekaligus menjadi pilar politik Islam dan falsafah dasar perjuangan PKS. Isinya yaitu:

1. Penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan
2. Pemerataan kesejahteraan seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan
3. Perluasan pendidikan serta pembaharuan etika dan budaya

<sup>43</sup> Ibid, hal 322-323.

4. Perekatan kembali (*cementation*) jiwa keumatan dan kebangsaan
5. Penegakan kedaulatan bangsa
6. Perlindungan harkat kemanusiaan
7. Peran serta dalam menentukan wajah peradaban dunia

Ketujuh hal di atas menjadi acuan minimal untuk kemudian dirincikan sebagai program kerja yang kongkrit oleh PKS. Penyelesaian masalah-masalah tersebut diyakini dapat tercapai apabila dikerjakan secara kolektif. Tentunya pula dengan jangka waktu yang tidak sebentar serta tetap membutuhkan momentum tertentu. PKS juga menetapkan prosedur tertentu dalam menjalankan rangkaian penuntasan masalah bangsa tersebut, antara lain; tak boleh ada komponen bangsa yang bergerak sendirian; tak boleh ada komponen bangsa yang meremehkan dan mengabaikan inisiatif sekecil apapun dari kelompok lain; serta adanya kesediaan untuk membuka diri, bekerjasama, dan bahu membahu dengan sesama.

Dari kedua hal besar di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan PKS dalam berpolitik adalah untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur, aman, dan sejahtera, di mana keanekaragaman individu dan kelompok yang memperjuangkannya dapat diwadahi dalam sistem yang berbentuk organisasi, partai, masyarakat (umat), dan negara.

### 3. Struktur Kepengurusan

Ketua Majelis Syura

: Hilmi Aminudin

Ketua Dewan Syariah Pusat

: Surahman Hidayat

Sekretaris : Bakrun Syafei  
Ketua Tanfiziyah : Bukhori Yusuf  
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Untung Wahono  
Sekretaris : Mardani Ali Sera

### **Dewan Pengurus Pusat**

Presiden : Muhammad Anis Matta  
Sekretaris Jenderal : Taufik Ridho  
Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman  
Ketua Bidang Kaderisasi : Musyafa Ahmad Rahim  
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan : Ahmad Zainudin  
Ketua Bidang Kepanduan Dan Olahraga : Asep Saefullah  
Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi : Taufik Ridho  
Kabid Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan: Mustafa Kamal  
Ketua Bidang Kelembagaan Pendidikan dan Sosial : Deni Tresnahadi  
Kabid Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan : Jazuli Juwaini  
Ketua Bidang Kewanitaan : Anis Byarwati  
Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : Aus Hidayat Nur  
Ketua Badan Pengembangan Kepemimpinan: Dwi Triyono  
Ketua Badan Pemenangan Pilkada : Muhammad Syahfan  
Badri Sampurno  
Ketua Badan Hubungan Luar Negeri : Rudivanto



#### 4. Alamat Kantor

DPP PKS DKI Jakarta: Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520

Telp : 021-78842116

Fax : 021-78846456

E-mail : [setjen.dpp@pks.or.id](mailto:setjen.dpp@pks.or.id)

### C. REPUBLIKA

#### 1. Sejarah, Perkembangan, dan Dinamika

Gambar 3

Logo Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia



Sumber: <http://www.google.com/>

Republika lahir pada 5 Desember 1990 dan kemudian terbit perdana pada 4 Januari 1993. Berdirinya Republika sebagai perwujudan salah satu program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ICMI. Melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dibentuk 17 Agustus 1992, ICMI menetapkan tiga program utama: (1) Pengembangan Islamic Centre; (2)

Pengembangan CIDES (Centre for Information and Development Studies) dan; (3) Penerbitan Harian Umum Republika.

Kedudukan ICMI sebagai pendiri Republika tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik yang mencerminkan bangkitnya golongan Islam kala itu.<sup>44</sup> Organisasi yang mengangkat sosok B.J. Habibie sebagai penanda atas bangkitnya politisi Islam ini, bukanlah sekadar perkumpulan cendekiawan muslim tetapi juga sebagai perhimpunan kekuatan politik Islam yang pada masa-masa 70-an dan 80-an banyak dipinggirkan oleh rezim Golkar dan militer. B.J. Habibie sebagai penggerak utama ICMI menghantarkan Republika pada jalur yang bergerak penuh dengan muatan politik Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa umat Islam sering kalah dalam bidang politik karena lemah dalam pemikiran dan opini. Oleh karena itu, ICMI kemudian mendirikan CIDES sebagai tandingan terhadap lembaga parpol lain kala itu, dan Republika sebagai pengimbang dari pers non-Islam.

Ideologi Republika adalah ideologi pemilikinya, PT Abdi Bangsa yang didirikan pada November 1992. Ideologi tersebut berputar pada Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman; dengan tujuan mempercepat terbentuknya 'civil society'. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan Republika dalam bentuk informasi dan sajian lainnya. Dalam hal ini, jelas sekali bahwa Republika berusaha menampilkan Islam dalam wajah moderat. Sebagai koran Islam, Republika memang tergolong liberal dibandingkan koran Islam lainnya. Salah

satu programnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan SK, Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir.

Republika banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi.<sup>45</sup> Dari sini bisa tampak bahwa Republika ingin mendefinisikan misinya sebagai media yang 'berbasis komunitas' dengan 'semua isi berita adalah tentang komunitas, dan sebisa mungkin menghindari berpolitik melalui media'.

Sekalipun demikian, tak dapat dihindari bahwa komunitas yang dimaksud adalah komunitas muslim. Ini terlihat dari pemberitaan Republika yang sangat rajin mengagendakan kepentingan umat Islam, termasuk rubrik-rubrik bertema Islam, semisal "Kolom Hikmah", "Dialog Jumat", "Dompot Dhuafa", "Lembaran Haji", dll. Tentu saja strategi ini terkait dengan *target-audience* Republika, yaitu: beragama Islam, golongan professional, manajer, eksekutif, pelajar, dan pengusaha, dengan mengambil pasar berskala nasional. Dari seluruh pembacanya, 63,36% berdomisili di Jakarta.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila ditarik kesimpulan bahwasanya *Republika* berusaha menampilkan Islam dari sisi yang lebih humanis, kosmopolis dan inklusif, sehingga mampu berdialog dengan berbagai pihak. Materi yang ditampilkan terkesan damai dan menggunakan

pendekatan yang lebih rasional. Dari karakter jurnalis *Republika* tersebut memang cenderung homogen dan didominasi oleh orang muslim.<sup>47</sup>

## 2. Profil *Republika*

### a. Visi Misi:

Sejak berdiri, *Republika* mengusung moto “Bukan sekedar Menjual Berita”. Visinya sendiri adalah menjadi perusahaan media cetak terpadu berskala nasional serta dikelola secara profesional Islami, sehingga berpengaruh dalam proses pencerdasan bangsa, pengembangan kebudayaan, serta peningkayan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia baru.

Misinya sendiri adalah: 1) Pencerdasan bangsa melalui pendalaman wawasan yang berbasis komunitas melalui pemberitaan yang akurat, terpercaya, edukatif, serta membela keadilan dan kebenaran; 2) Meningkatkan dan menguatkan prestasi dan dedikasi individu menjadi sebuah *team* sebagai kunci untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan.

### b. Rubrik

Tidak terlepas dari Misi dan Visi Harian Umum *Republika*, isi berita yang ditampilkan lebih banyak bernuansa Islam. Meskipun demikian untuk memenuhi tuntutan masyarakat Harian *Republika* juga menampilkan berita

lain yang menarik dan untuk konsumsi publik. Pada halaman pertama kita akan mendapatkan tampilan berita utama. Topik Nasional hadir di 2 (dua) halaman penuh. Disamping itu masih banyak topik-topik lain yaitu Nusantara, Opini, Telisik, Internasional, Ekonomi Bisnis, Kabar Kota, Bursa, Wawancara, Investasi Global, Syariah, Sepak Bola, Arena, Iptek dan Kesehatan, Pendidikan, Warna dan TV Guide, Warna.

Harian Umum Republika konsisten terbit dengan 28 halaman. Untuk kalangan pebisnis dapat memanfaatkan halaman *Class Ad* untuk menawarkan produknya melalui iklan yang dipasang di harian republika ini. Pada halaman Opini di sediakan satu halaman untuk menuangkan ide tulisan yang berasal dari pakar ataupun pembaca mengenai topic yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat.

Gambar 4  
Tampilan Halaman Muka Harian Republika



Sumber: <http://www.google.com/>

**c. Struktur Organisasi**

Direktur Utama	: Erick Tohir
Wakil Direktur Utama	: Daniel Wewengkang
Direktur Pemberitaan	: Ikhwanul Kiram Mashuri
Direktur Operasional	: Tommy Tamtomo
GM Keuangan	: Didik Irianto
GM Marketing dan Sales	: Yulianingsih
Pemimpin Redaksi	: Nasilin Masha
Wakil Pemimpin Redaksi	: Arys Hilman Nugraha
Redaktur Pelaksana	: Elba Damhuri
Redaktur Senior	: Anif Punto Utomo
Wakil Redaktur Pelaksana	: Irfan Junaidi, Johar Arief, Firkah Fansuri, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto.
Sekretaris Redaksi	: Fachrul Ratzi

**d. Alamat Redaksi:**

Jl. Warung Buncit Raya 37, Jakarta 12510

Tel: (021) 7803747 (Hunting) / (021) 79184744 (Iklan)

Fax: (021) 7900640 (P. 1.1.1) / (021) 7981160 (Iklan) /

(021) 79198442 (Sirkulasi dan Berlangganan)

Email: [secretariat@republika.co.id](mailto:secretariat@republika.co.id)

#### **D. KOMPAS**

##### **1. Sejarah, Perkembangan, dan Dinamika**

*Kompas* mulai diterbitkan di Jakarta pada 28 Juni 1965. Pada terbitan awal ini, *Kompas* menyajikan empat halaman dengan *headline* berita “KAA II Ditunda Empat Bulan”. Halaman pertama edisi ini memasang 11 berita luar negeri dan 7 berita dalam negeri. Tajuk rencana saat itu belum ada, iklan pun hanya enam buah. Oplah pertamanya mencapai 4.800 eksemplar dan meningkat menjadi 8.003 eksemplar di tiga bulan berikutnya. Pendirinya, P.K. Ojong dan Jakob Oetama, sebelumnya telah cukup sukses menerbitkan majalah bulanan bernama *Intisari*. Jabatan sebagai Pemimpin Umum dipegang P.K Ojong dan Jakob Oetama sebagai Pemimpin Redaksi Kompas. Kantor redaksi *Kompas* sempat berpindah-pindah kala itu, dari yang awalnya menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian pindah ke kantor redaksi *Intisari* di percetakan PT Kinta.<sup>48</sup>

*Kompas* dilahirkan dalam situasi sejarah ketika “politik menjadi panglima”. Partai politik diakui sebagai satu-satunya organisasi sosial yang boleh menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Karena itu, setiap surat kabar yang terbit pada waktu itu diharuskan untuk mengaitkan diri (berafiliasi) dengan salah satu partai politik yang ada. Dalam hal ini *Kompas* memilih

berafiliasi dengan Partai Katolik yang waktu itu dipimpin oleh IJ. Kasimo. Walaupun *Kompas* mengakui bahwa dirinya sudah lepas dari Partai Katolik tersebut, namun pada kenyataannya *Kompas* tidak bisa lepas dari stigma bahwa koran ini identik dengan katolik terlebih bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan Islam garis keras.<sup>49</sup>

Gambar 5  
Karikatur Pendiri Harian *Kompas*



Sumber: <http://www.google.com/>

Memanasnya Gerakan 30 September saat itu sempat mengakibatkan situasi politik yang tidak pasti, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari informasi demi mengurangi



ketidakpastian. *Kompas* melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Terbukti, oplah *Kompas* meningkat pesat hingga saat peralihan kekuasaan resmi dari Orde Lama ke Orde Baru. Peralihan kekuasaan itu juga merubah pola pembangunan ekonomi negara menjadi sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Perubahan pola memungkinkan terjadinya persaingan produk dalam bentuk promosi dan periklanan. Pemasukan iklan di *Kompas* pun membengkak, menjadikan harian ini mampu menata diri menjadi lebih profesional.

Di lain pihak, perbaikan ekonomi di masyarakat saat itu, mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk pers. Semua faktor itu kemudian yang mengantarkan oplah *Kompas* menembus 500.000 eksemplar pada akhir 1986. Kesuksesan *Kompas* ini sempat diselingi dengan kasus pembredelan akibat suhu politik yang meningkat pada awal 1978, tepatnya saat mahasiswa menentang keras pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Pers, termasuk *Kompas* dan tujuh media lain, yang saat itu menyajikan kronologis peristiwa dalam pemberitaannya, terpaksa ditutup untuk sementara. Mereka diperbolehkan terbit lagi sekitar tiga minggu kemudian dengan syarat menandatangani perjanjian dengan pemerintah.

Jumlah oplah *Kompas* yang terus meningkat diikuti dengan perbaikan mutu informasi. Kesimpulan ini dinilai dari tingginya kredibilitas informasi yang disajikan *Kompas* di kalangan mahasiswa, salah satunya UGM.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> R Fadri, *Motivasi dan Persepsi Mahasiswa terhadap Pojok Kompas*, Yogyakarta, 1998, dalam *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*, hal 56.

Kredibilitas tinggi di kalangan mahasiswa dianggap penting untuk melihat persepsi pembaca, karena mahasiswa termasuk dalam salah satu golongan sosial yang menjadi sasaran utama harian *Kompas*. Modal perusahaan yang semakin bertambah kemudian disalurkan *Kompas* dengan melakukan ekspansi bisnis, baik dengan menerbitkan, membeli, ataupun bekerja sama dengan perusahaan pers lain, serta memasuki kawasan-kawasan non-pers.

Tercatat sedikitnya ada enam jenis usaha yang berbeda yang dimasuki *Kompas*, antara lain pers, penerbitan buku, percetakan, pasar swalayan, bank, dan tambak udang). Dengan semua modal di sektor tersebut, tidak aneh bila kemudian bila *Kompas* disebut sebagai konglomerat informasi. Akibatnya banyak kritikan dan peringatan yang dilontarkan oleh pengamat dan intelektual terhadap langkah ekspansi yang dilakukan *Kompas* tersebut. Mereka mengkhawatirkan bahwa *Kompas* akan mengaburkan batas antara idealisme dan komersialisme. Kekhawatiran itu beralasan bahwa di satu sisi, kepentingan-kepentingan ekonomi yang sedemikian besar membuat *Kompas* rentan terhadap intervensi pemerintah, sedangkan di sisi lain, membuat *Kompas* senantiasa menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Padahal sebagai lembaga pers, *Kompas* harus menjaga jarak agar dapat terus mengawasi dan mengkritik pemerintah.

Walaupun kritik dan perdebatan terus muncul, *Kompas* diyakini akan tetap menjadi harian terbesar dan paling sukses di Indonesia. Apalagi, stigma yang dulu pernah melekat pada *Kompas* sebagai koran Katolik, seakan

koran yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengotakan latar belakang suku, ras, dan golongan. Dewasa ini, *Kompas* akhirnya dikenal telah mengarahkan kebijakan redaksional penulisan berita pada upaya penciptaan sikap terbuka, toleran, dan kritis bagi para pembaca. Oleh karena itu, tipikal penulisan pada surat kabar ini senantiasa peka akan nasib manusia yang sekaligus jadi pegangan klasik jurnalistik.

## 2. Profil *Kompas*

### a. Visi Misi:

Visi harian *Kompas* terangkum dalam slogan: “Ikut Mengembangkan Saling Pengertian dalam Masyarakat yang Majemuk” dan “Menghibur yang Papa dan Mengingatkan yang Mapan”. Oleh Jakob Oetama, visi tersebut menjadi dasar dari segala perilaku informasi yang berlaku di *Kompas*. Visi ini diperkuat pula oleh pernyataan P.K Ojong mengenai tugas pers yang diterbitkan di rubrik *Kompasiana* April-Mei 1996.<sup>51</sup>

“Secara intuitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama dari pers ialah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah.... Tugas pers bukanlah untuk menjilat yang berkuasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.... Mereka [penguasa itu] harus bekerja dengan pikiran bahwa selalu ada pentungan (*social control*) yang selalu siap sedia untuk memukul mereka, kalau menyeleweng.”

Sedangkan misi *Kompas* adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan dengan menyediakan dan menyebarkan informasi terpercaya.

## b. Rubrik

Pada hari biasa, Kompas umumnya memuat 40 halaman. Rubriknya sendiri terbagi menjadi *Headline* di halaman pertama dan biasanya menyambung ke halaman 15; lalu rubrik Politik dan Hukum sebanyak 4 halaman; rubrik Opini 2 halaman; dan Internasional 4 halaman. Sedangkan rubrik Pendidikan dan Kebudayaan; Lingkungan dan Kesehatan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; serta rubrik Sosok masing-masing mendapat jatah 1 halaman.

Gambar 6  
Tampilan Halaman Muka Harian *Kompas*



Sumber: <http://www.google.com/>

Rubrik Ekonomi yang berada di bagian kedua memiliki ruang yang paling banyak di koran Kompas, yaitu 5 halaman. Lalu ada rubrik Nusantara

Nama dan Peristiwa 1 halaman; serta bonus rubrik Klasika sebanyak 7 halaman yang dibagi untuk Rumah Pengetahuan, Intermeso, Karier, Etalase, dan Lowongan Pekerjaan. Untuk hari Minggu, Kompas juga menambah rubrik Sosialita dan Parodi. Dari pembagian rubrik tersebut, dapat dilihat bahwa Kompas berusaha seimbang dalam menyampaikan beragam informasi untuk pembacanya. Sasaran pembacanya sendiri adalah menengah ke atas dengan tingkat pendidikan mayoritas S1.

### c. Struktur Kepengurusan

Pemimpin Umum	: Jacob Oetama
Wakil Pemimpin Umum	: Agung Adiprasetyo
	Lilik Oetama
GM Litbang	: F. Harianto Santoso
GM SDM Umum	: Bambang Sukartiono
Manajer Diklat	: Tony D Widiastono
Direktur Bisnis	: Hardanto Subagyo
GM Iklan	: Elly Handojo
Pemimpin Redaksi	: Rikard Bagun
Wakil Pemimpin Redaksi	: Trias Kunchayono
	Taufik M. Mihardja
Redaktur Senior	: Ninok Leksono
Redaktur Pelaksana	: Budiman Tanuredjo

James Luhulima

Sekretaris Redaksi : Retno Bintarti

M. Natsir

**d. Alamat Redaksi**

Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270

Tel: (021) 537710 ; 537720 ; 533730

Fax: (021) 5486085 ; 5483581

Email: [Kompas@Kompas.com](mailto:Kompas@Kompas.com)

**E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian mengenai *framing* dalam pemberitaan media massa memang menarik untuk diteliti, karena kita akan mengetahui bagaimana masing-masing media massa membingkai sebuah peristiwa yang terjadi secara berbeda. Penelitian mengenai pembedaan media telah dilakukan beberapa peneliti, seperti milik salah seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Syarifuddin Fajri yang selesai pada tahun 2011 berjudul *Kontroversi Padi Supertoy HL-2 Pada Pemberitaan Media Massa*. Penelitian Muhammad Fajri ini memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini dalam model dan teknik analisis *framing* yang digunakan untuk mengupas pemberitaan, sedangkan perbedaannya adalah objek media yang digunakan serta tipikal peristiwa yang terjadi.

Intisari dari penelitian tersebut adalah menganalisis kontroversi

Indonesia, Kompas, dan Koran Tempo tanggal 5-12 September 2008. Harian Media Indonesia memandang bahwa kasus tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan uji coba dan pelepasan suatu varietas baru yang menjadikan kehidupan petani makin terpuruk. Pandangan Media Indonesia mirip dengan pandangan Koran Tempo. Namun Koran Tempo cenderung melihat bahwa pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya faktor politik. Sedangkan Kompas cenderung lebih cenderung melihat bahwa pelanggaran aturan yang terjadi pada kasus Padi Supertoy diakibatkan oleh sikap ketergesa-gesaan PT Sarana Harapan Indopangan dalam mengomersilkan benih Padi Supertoy.

Kemudian ada juga penelitian Mahar Rachanca mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012 berjudul "*Pembingkaihan Koran Kompas dan Republika Terhadap Peristiwa Perang Israel-Palestina*". Persamaan penelitian Mahar dengan penelitian "*Konstruksi PKS Dalam Pemberitaan Kasus Suop Kuota Impor Daging Sapi di Koran Republika dan Kompas*" terletak pada objek pemberitaan yang digunakan, yaitu *Kompas* dan *Republika*. Bedanya, penelitian Mahar Rahanca bertujuan untuk mengetahui *frame* / bingkai yang dilakukan oleh *Kompas* dan *Republika* dalam pengemasan berita tentang perang antara Israel dan Palestina dengan rentang objek pemberitaan sejak 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009.

Perbedaan penelitian juga terletak pada perangkat *framing* yang digunakan, yaitu model Pan dan Konsicki yang mengoperasionalkan empat

menyimpulkan bahwa dalam penelitiannya *Kompas* lebih bersikap humanis menyikapi pemberitaan perang Israel-Palestina, sedangkan *Republika* membangun konstruksi lewat ideologi falsafah Islam moderatnya. Sedangkan mengenai jalur diplomasi yang sempat digencarkan oleh kedua pemerintahan negara yang berperang, kedua media massa nasional tersebut sama-sama menilai bahwa cara tersebut sudah tidak mampu lagi menjadi alternatif penyelesaian konflik.

... Pemilihan objek penelitian *Kompas* dan *Republika* pada penelitian *framing* seperti yang dilakukan pada penelitian ini, sepertinya cenderung didasari pada perbedaan sudut pandang yang mencolok antara kedua media dalam membingkai sebuah peristiwa. Sama seperti penelitian tesis Lina Kushidayati, mahasiswi Faculty of Arts Leiden University, yang diterbitkan dalam majalah *Millah* Vol. IX No 1 Agustus 2009 dengan judul "*Shari'a Contested: Public Opinions in Kompas and Republika 2000-2004*". Perbedaan mencolok antara tesis tersebut dengan penelitian ini terletak pada rentang waktu objek pemberitaan, dimana Lina membutuhkan waktu hingga 4 tahun lamanya demi memenuhi kebutuhan penelitiannya.

Penelitiannya berisi tentang perdebatan terbuka tentang formalisasi syariah di beberapa kota Indonesia, khususnya di surat kabar Indonesia, termasuk *Kompas* dan *Republika*. Perdebatan tersebut terjadi antara Islam liberal dan Islam fundamental yang menghasilkan pendapat pro maupun kontra. Pada penelitiannya, Lina menemukan bahwa sebagian besar artikel di



hanya seperempat dari mereka yang menentang pelaksanaan syariah. Sedangkan artikel-artikel di *Kompas* hampir seimbang dalam hal proporsinya. Persamaan penelitian tesis ini skripsi penulis terletak pada objek pemberitaannya yang menggunakan koran *Republika* dan *Kompas*.

Selain penelitian *framing*, peneliti juga menelaah sebuah disertasi yang ditulis mahasiswa S3 di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2011 bernama Arief Munandar dengan judul, "***Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004***". Disertasi beliau membantu peneliti untuk melihat PKS dari sudut pandang yang lebih luas, memahami karakteristik para kader dan petinggi PKS, konflik internal yang sempat merebak pasca Pemilu 2004, serta sistem *tarbiyah* yang menjadi ciri khas Partai Keadilan Sejahtera dalam tujuannya merekrut dan menggembleng kader baru. Penelitian tersebut juga

... dan tinjauan partai politik